

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu program prioritas Kementerian Pertanian dalam mengimplementasikan Nawacita Presiden Joko Widodo – Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah kedaulatan pangan, melalui pencapaian swasembada dan peningkatan produktivitas komoditas padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, daging, dan gula. Upaya pencapaian tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti upaya khusus, intensifikasi, dan ekstensifikasi pertanian melalui peningkatan indeks pertanaman (IP) maupun perluasan luas baku sawah untuk mewujudkan kemandirian pangan. Sasaran produksi komoditas pangan terutama padi, jagung, dan kedelai pada 2015–2019 adalah peningkatan produksi padi dari 73.162.171 ton (2014) menjadi 81.971.853 ton (2019), jagung dari 20.087.445 ton (2014) menjadi 22.506.235 ton (2019), dan kedelai dari 1.265.646 ton (2014) menjadi 1.418.046 ton (2019). (Kementerian Pertanian, 2015).

Upaya pencapaian produksi pangan kedepan tampaknya akan menemui kendala akibat adanya perubahan iklim di Indonesia. Haryono (2010), mengemukakan bahwa dampak perubahan pola hujan dan kejaiian iklim ekstrim adalah antara lain peningkatan ancaman organisme pengganggu tanaman (OPT), mundurnya awal musim hujan, banjir dan kekeringan (Haryono, 2010).

Akibat dari hal tersebut, risiko penurunan produksi akan Bertambah dari 2,4-6 persen menjadi 10 persen jika tidak ada terobosan baru. Apalagi jumlah penduduk Indonesia pada saat ini mencapai 237,6 juta orang dan terus bertambah dengan laju pertumbuhan sebesar 1,49 persen (P.U & H.S, 2010). Oleh karena itu sangatlah tepat kalau salah satu target utama Kementerian Pertanian adalah program diversifikasi pangan (pertanian, 2009).

Peningkatan ketahanan pangan merupakan prioritas utama dalam pembangunan karena pangan merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi manusia sehingga pangan sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Ketahanan pangan diartikan sebagai tersedianya pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau dan aman dikonsumsi bagi setiap warga untuk menopang aktivitasnya sehari-hari sepanjang waktu. (P.S, Rachman, & Mewa, 2002). Ketahanan pangan merupakan landasan utama bagi kehidupan berkelanjutan suatu bangsa. Menyeluruh dan kompleks, konsep ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari produksi pangan hingga distribusi, aksesibilitas, dan pemanfaatan nutrisi. Dalam era globalisasi dan perubahan iklim, tantangan terhadap ketahanan pangan semakin kompleks, mendorong masyarakat, pemerintah, dan sektor pertanian untuk berinovasi guna menjaga ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Pangan sendiri merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan

atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain.

Pertanian berkelanjutan menjadi kunci dalam membangun ketahanan pangan. Pergeseran dari praktik pertanian konvensional menuju pertanian organik atau berbasis ekologi menjadi solusi utama. Penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang berlebihan dapat merusak tanah dan air, serta menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, masyarakat agraris dan petani modern semakin mengadopsi teknik pertanian organik, penanaman polikultur, dan rotasi tanaman untuk meningkatkan kesehatan tanah dan tanaman. Kebijakan pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan sangat menentukan.

Pada awalnya, penelitian ini direncanakan untuk dilakukan di karantina pertanian Stasiun Kelas II B Bangkalan. Stasiun ini dipilih karena lokasinya yang strategis dan relevansi operasionalnya dalam mendukung kegiatan ekspor-impor di wilayah Madura. Namun, setelah mempertimbangkan berbagai faktor termasuk cakupan layanan, volume kegiatan ekspor-impor, dan terbitnya peraturan presiden 45 tahun 2023 tentang badan karantina Indonesia yang secara sah mengintruksikan perubahan nomenklatur Balai Karantina Pertanian, lokasi penelitian kemudian dipindahkan ke Badan Karantina Indonesia Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur pada kantor pelayanan Tanjung Perak. (Pertanian S. B., 2023)

Lokasi peneliti yang dulunya berlokasi di di karantina pertanian Stasiun Kelas II B Bangkalan. kini sudah menjadi salah satu dari unit satuan pelayanan badan karantina Indonesia balai karantina hewan, ikan, dan tumbuhan Jawa Timur

alasan peneliti memilih kantor pelayanan tanjung perak adalah : karena Tanjung Perak sebagai salah satu pelabuhan utama di Indonesia, memainkan peran krusial dalam perdagangan internasional, sehingga kualitas pelayanan di kantor ini sangat penting untuk diteliti guna memahami dampaknya terhadap ketahanan pangan nasional.

Balai karantina hewan, ikan, dan tumbuhan jawa timur. memiliki beberapa wilayah kerja yang tersebar di seluruh provinsi jawa timur guna mempermudah koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas diantaranya: wilayah kerja gersik, wilayah kerja sedayu, wilayah kerja sangkapura, wilayah kerja kalibuntu, wilayah kerja kantor pos kediri, wilayah kerja ketapang, wilayah kerja tanjung wangi, dan wilayah kerja aburrahman saleh

Pemerintah sangat berperan dalam penjagaan kualitas dan ketahanan pangan, sehingga beberapa aspek penting dalam pengelolaannya sangat krusial untuk dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dari ini, pemerintah mengambil langkah cepat sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2023 tentang pembentukan Badan Karantina Nasional (Pertanian S. B., 2023). Badan karantina juga memainkan peran penting dalam mendukung perdagangan internasional. Dengan adanya sistem karantina yang kuat, suatu negara dapat memastikan bahwa ekspor dan impor produk pertanian sesuai dengan standar internasional, sehingga memperkuat reputasi produk pertaniannya di pasar global.

Badan Karantina Indonesia memiliki peran dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan perikanan. Ini mencakup perlindungan keanekaragaman

hayati, pengendalian ekspor bahan baku dan mendukung upaya pemerintah dalam pengembangan sektor pertanian dan perikanan. Berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesia No. 1 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia Pasal 61 yang berbunyi “Badan Karantina memiliki tugas melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan resiko karantina tumbuhan”(Subarkah, 2023).

Payung hukum yang mengatur karantina hewan, ikan, dan tumbuhan di Indonesia sangat komprehensif. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menjadi dasar utama penyelenggaraan karantina di Indonesia. Undang-undang ini memberikan landasan bagi berbagai peraturan pelaksana lainnya yang mengatur prosedur dan persyaratan karantina untuk kegiatan ekspor dan impor. (Pertanian S. B., 2023)

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan merupakan peraturan yang secara spesifik mengatur pelaksanaan karantina untuk masing-masing jenis komoditas. Peraturan-peraturan ini menetapkan standar dan prosedur yang harus dipenuhi dalam proses karantina guna memastikan keamanan dan kualitas produk yang diekspor atau diimpor.

Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kesehatan Hewan,

Sertifikat Kesehatan Tumbuhan, dan Sertifikat Fumigasi, menekankan pentingnya sertifikasi dan kepatuhan terhadap standar internasional.

Adanya payung hukum ini, Balai Karantina diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien. Namun, seiring dengan perubahan regulasi dan tantangan global, kualitas pelayanan Balai Karantina menjadi aspek krusial yang perlu ditingkatkan. Pelayanan yang baik tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mendukung kelancaran proses ekspor-impor yang pada akhirnya berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional.

Secara keseluruhan, pembentukan badan karantina adalah langkah proaktif untuk melindungi ketahanan pangan dan keberlanjutan pertanian. Dengan memberikan fokus pada pencegahan, pengawasan, dan respons cepat terhadap ancaman potensial, badan karantina Indonesia balai karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, jawa timur kantor pelayanan tanjung perak sukses menyelenggarakan beberapa program tersebut seperti pengawasan dalam kegiatan ekspor seperti komoditas pertanian yaitu kopi, tembakau,kakao, dan tebu.

Hal ini terdapat didalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka dilaksanakan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan (Suharto, S.H., 2006).

Balai Karantina Hewan, Ikan, Dan, Tumbuhan jawa timur Memiliki Fungsi Pemeriksaan terhadap impor dan ekspor barang-barang tertentu, termasuk

pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman, serta memberikan jaminan terhadap barang-barang yang mau di ekspor atau di impor di terima di negara tujuan. Dengan adanya Badan Karantina Indonesia perdagangan internasional dapat berlangsung dengan lebih aman, efisien, dan berkelanjutan, dan menjamin kualitas produk.

Kantor Pelayanan Tanjung Perak menjadi UPT lingkup badan karantina Indonesia Balai Karantina Hewan, Ikan, Dan, Tumbuhan Jawa timur yang berkomitmen serta berperan aktif membuka pasar ekspor komoditas di Jawa Timur terutama dalam sector pertanian dan perikanan. Kantor pelayanan Tanjung Perak memiliki peran penting dalam memastikan bahwa barang yang mau di ekspor atau di impor memenuhi standar karantina dan keamanan pangan yang telah di tetapkan. Kualitas pelayanan yang di berikan oleh badan karantina sangat menentukan kelancaran dan keberhasilan kegiatan ekspor – impor.

Seiring berkembangnya zaman kegiatan ekspor-impor terjadi hilirisasi beberapa komoditas di Indonesia. Kegiatan ini bukan hanya fokus pada hulu saja tetapi merambat juga ke hilir. Proses pemeriksaan yang lambat dapat mengakibatkan adanya proses pemeriksaan yang lambat. Hal tersebut dapat menghambat kelancaran proses ekspor-impor bahkan menyebabkan penundaan dalam pengiriman barang.

Komoditas pertanian asal Jawa Timur yang melesat tajam semenjak tahun 2022 ada empat komoditas unggulan hasil perkebunan asal yang produksinya tercatat paling tinggi nasional. yaitu tebu, tembakau kopi dan kakao hal ini di sampaikan oleh gubernur Jawa Timur sendiri (Nasrullah & Hakim, 2023)

Tabel 1. 1
KOMODITAS EKSPOR PERTANIAN JAWA TIMUR

Ekspor	Keterangan
Tebu	2021 tercatat 120 metrix ton
Tembakau	2024 Tercat 1.033 ton.
Kopi	2023 tercatat sebanyak 41.263.486 kg.
Kakao	2024 Tercatat 30 ton.

Sumber: (Widarti, 2023), (Kumparan, 2021), (Lambertus, 2024), (Redaksi, 2024)

Tabel 1. 2
KOMODITAS IMPOR PERTANIAN JAWA TIMUR

Impor	Keterangan
Non migas	2023 tercatat miliar dolar AS

Sumber : (Antara, 2023)

Hal itu disebabkan peran pemerintah sangatlah penting khususnya menaungi wilayah jawa timur harus segera dan secepatnya peka. Karenainimenjadi wajah baru para petani d jawa timur untuk semakin memperluas jaringan bisnisnya terutama dalam bidang pangan. Untuk menjadikan pangan lebih berkualitas dan lebih tahan lama, maka harus ada yang namanya teknik untuk menjaga ketahanan.

Melalui Badan Karantina Indonesia Balai Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Jawa Timur, Kantor Pelayanan Tanjung Perak, diharapkan menjadi titik terang para petani dan para eksportir dan *trader* dalam menjadikan pangan yang ada di Jawa Timur lebih berkualitas. Salah satunya, dengan meningkatkan kualitas pelayanan di dalamnya, agar seluruh program dan kegiatan pemerintahan bisa lebih maksimal.

Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana kualitas pelayanan Balai Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Jawa Timur dengan judul **“Kualitas Pelayanan Badan Karantina Indonesia Balai Karantina Hewan, Ikan, DanTumbuhan Jawa Timur untuk MendukungKetahanan Pangan dalam Kegiatan Ekspor-Import di Kantor Pelayanan Tanjung Perak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk mengetahui pelayanan di Balai Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Jawa Timur Kantor Pelayanan Tanjung Perak, maka rumusan masalah skripsi ini adalah “Bagaimanakah kualitas pelayanan DiKantor Pelayanan Tanjung Perak untuk menjaga ketahanan pangan dalam kegiatan ekspor-import?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah “Untuk mengetahui kualitas pelayanan di Kantor Pelayanan Tanjung Perak untuk menjaga ketahanan pangan dalam kegiatan ekspor-import”

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan penelitian diatas,maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Penelitian ini disusun bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berfikir dan menulis secara ilmiah serta menambah pengetahuan penulis terhadap pengembangan wawasan pribadi.

b. Bagi Universitas Wiraraja

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dari suatu karya ilmiah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan pedoman bagi mahasiswa yang ingin melakukan pengkajian lebih lanjut terkait penelitian ini khususnya bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

c. Bagi Pemerintah/Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih mahasiswa terkait Pengembangan Pelayanan pada ketahanan pangan dalam kegiatan ekspor-impor pada kantor Pelayanan Tanjung Perak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian. Dalam laporan penelitian ini, sistematika penulisan terdiri atas lima bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang materinya sebagian besar menyempurnakan usulan penelitian yang berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari pembahasan secara terperinci yang memuat tentang penelitian terdahulu, teori administrasi publik, teori pelayanan, hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang pengembangan metode yang terdiri dari Fokus Penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrumen penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, Teknik Analisa Data, Keabsahan data.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Badan Karantina Indonesia Balai Karantian Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Jawa Timur Kantor Pelayanan Tanjung Perak.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan temuan di lapangan sesuai dengan fokus yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah

BAB VI PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan dari serangkaian pembahasan skripsi berdasarkan analisis yang telah dilakukan serta saran-saran untuk disampaikan kepada obyek penelitian atau bagi penelitian selanjutnya.